

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintah di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintah yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai organisasi lembaga pemerintahan, pemerintah daerah mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan

keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen.

Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya dikeluarkan ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah melakukan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah yang baik dalam suatu pemerintahan bisa dilihat dari bagaimana laporan keuangan disajikan, bagaimana tiap pos-pos laporan keuangan dirincikan dan bagaimana hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk menilai laporan keuangan

pemerintah daerah tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Penilaian dilakukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, terutama untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, ketaatan terhadap standar akuntansi, penilaian terhadap tingkat ekonomi dan efisiensi penggunaan anggaran (APBD) atau kinerja manajerial. Keberadaan laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas politik dalam rangka menciptakan *good governance*.

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Aspek pertanggungjawaban merupakan faktor kunci dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal (daerah). Melalui laporan pertanggungjawaban keuangan, dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan negara/daerah, baik sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Dengan kata lain, melalui laporan pertanggungjawaban pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran, dapat diketahui tingkat efektivitas dalam mengelola sumber-sumber penerimaan beserta jumlah pungutan setiap tahun.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskan bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan yang

ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akan tetapi masih banyak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut sangat wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan.

Pemerintah daerah Kabupaten Garut sebagai daerah otonom mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu. Sebagai perwujudan dalam menilai

akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat keputusan di bidang ekonomi, sosial maupun politik, Pemerintah Kabupaten Garut telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Garut digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Garut, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tahun 2017 mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke tiga kalinya.

Namun, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pemerintah Kabupaten Garut masih menyisakan masalah. *Garut Governance Watch (GGW)* mempertanyakan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Garut selama tiga kali berturut-turut. Pasalnya, GGW menilai kondisi pengelolaan keuangan di Pemkab Garut masih terbilang carut marut. **(Sumber: Robi Taufik Akbar, Galamedianews.com, *Garut Governance Watch: Predikat WTP Pemkab Garut masih Menyisakan Masalah* diakses pada hari Senin tanggal 05 November 2018 pukul 05.34 melalui**

website: <http://www.galamedianews.com/daerah/193098/ggw-predikat-wtp-pemkab-garut-masih-menyisakan-masalah.html>).

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut tahun 2017 mencapai Rp 3,7 triliun atau masih sama dengan tahun 2016 lalu. Bupati Garut, Rudy Gunawan, menjelaskan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun itu di dapat dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, yakni sebesar Rp 600 miliar dan sisanya di dapat dari hasil dana transfer seperti DAU, DAK dan yang lainnya. **(Sumber: Poros Garut, Porosgarut.com, *Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 37 Triliun* diakses pada hari Senin tanggal 05 November 2018 pukul 05.47 melalui website: <https://www.porosgarut.com/apbd-garut-tahun-2017-rp-37-triliun.html>).**

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Garut antara lain, ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercermin dari penerimaan pendapatan asli daerah yang sampai saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer yang merupakan pendapatan dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Transfer Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi. Berikut ini

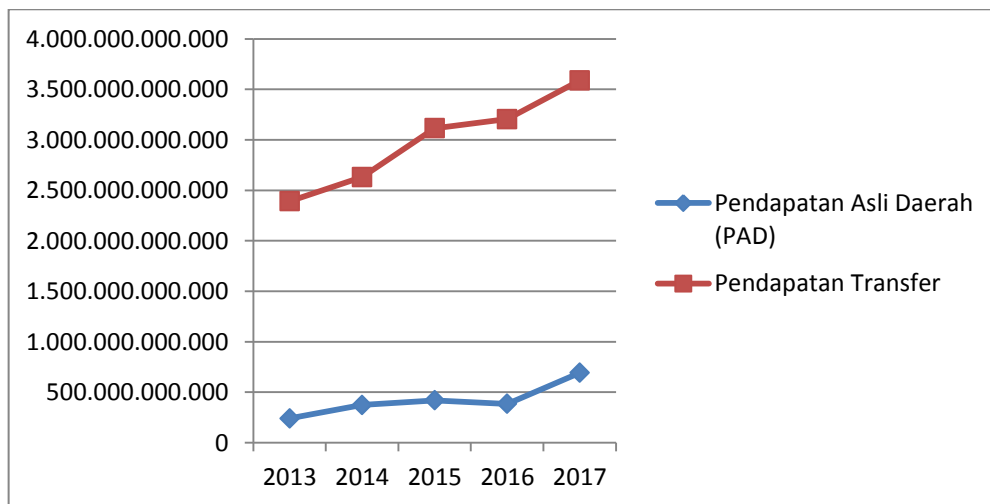
tabel yang menunjukkan data Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer
Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	%
2013	240.631.630.078	2.391.885.221.952	10.06%
2014	373.261.713.306	2.630.765.368.597	14.18%
2015	419.201.758.615	3.114.721.307.167	13.45%
2016	385.312.223.031	3.204.547.476.851	12.02%
2017	692.255.365.083	3.587.055.889.503	19.29%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Garut, Data Diolah Peneliti, 2018.

Grafik 1.1
Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer
Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013-2017



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Garut, Data Diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 1.1 dan grafik 1.1 di atas yang berwarna biru dapat dilihat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut relatif kecil dibanding grafik yang berwarna merah merupakan realisasi Pendapatan Transfer yang

diterima dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Garut masih tergantung besar pada bantuan pemerintah pusat. Selain itu, kemampuan Pemerintah daerah Kabupaten Garut masih rendah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber PAD yang dimiliki.

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan sektor pendapatan untuk sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut diantaranya masih rendahnya wajib pajak daerah terhadap pelaksanaan kewajibannya, pemberlakuan multi tarif pada jenis pajak hotel dan restoran, serta penetapan tarif tinggi pada jenis pajak hiburan yang mengakibatkan kurang tergalinya potensi pada jenis-jenis pajak tersebut, kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam menopang optimalisasi kinerja retribusi daerah, dan kurangnya sumber daya ahli/profesional pada sektor pendapatan asli daerah.

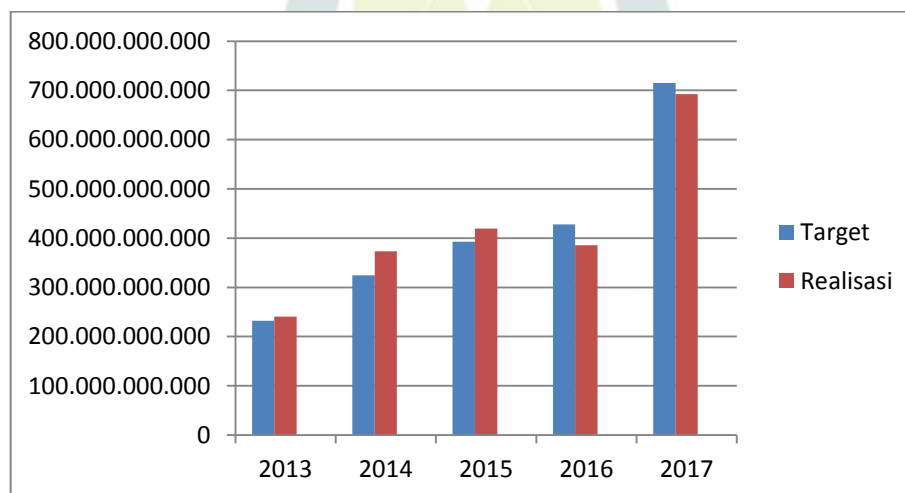
Hal ini menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan perimbangan keuangan dari pemerintah di atasnya semakin dominan. Berikut adalah tabel dan grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2013-2017.

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013-2017

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target (Dalam Rupiah Rp)	Realisasi (Dalam Rupiah Rp)
2013	232.115.331.304	240.631.630.078
2014	324.329.660.481	373.261.713.306
2015	392.357.893.451	419.201.758.615
2016	427.865.889.432	385.312.223.031
2017	714.955.896.619	692.255.365.083

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Garut, Data Diolah Peneliti, 2018.

Grafik 1.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013-2017



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Garut, Data Diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 1.2 dan grafik 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2013-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya, pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah selalu melebihi dari yang ditargetkan. Akan tetapi di tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut mengalami penurunan yang cukup signifikan, hanya mencapai 385.312.223.031 dari target

yang dianggarkan sebesar 427.865.889.432. Tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut kembali meningkat sebesar 692.255.365.083, tetapi meskipun mengalami peningkatan, di tahun 2017 pencapaian realisasi pendapatan asli daerah tersebut tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebesar 714.955.896.619. Seperti yang disampaikan oleh Iman Alirahman mengatakan bahwa “Diakuinya total PAD Garut selama ini masih dibawah 10% dari total APBD yaitu sekitar 450 miliar dari nilai total APBD Garut 3,7 triliun”. (Sumber: **Jabarprov.go.id, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Masih Dibawah Sepuluh Persen** diakses pada hari Senin tanggal 05 November 2018 pukul 05.56 melalui *website*:

<http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/21943/2017/03/15/PAD-Garut-Kita-Masih-Dibawah-Sepuluh-Persen>).

Keberadaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pelaksanaan otonomi daerah, menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan cara meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

Keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat diketahui berdasarkan tingkat efektivitas dan efisiensi suatu program. Tingkat Efisiensi pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan cara membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD bisa menggunakan analisis rasio keuangan berupa rasio efektivitas dan efisiensi PAD.

Kemudian, hasil analisis rasio tersebut digunakan sebagai tolok ukur menilai kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013-2017 (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut)**”.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan Pendapatan Transfer. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut selama ini masih di bawah 10% dari total APBD.

2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan.
3. Realisasi PAD tahun 2016-2017 tidak mencapai target yang dianggarkan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dan fokus permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017?
2. Strategi apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana strategi yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis

menggolongkan kegunaan penelitian ini menjadi dua, yakni secara teoritis dan praktis.

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian yang dijalankan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai acuan menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi PAD.

1.5.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pentingnya pengelolaan pendapatan asli daerah beserta komponennya sebagai sumber utama pendapatan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan untuk mendapatkan gelar S1.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan dimanfaatkan dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam meningkatkan pendapatan.

c. Bagi Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan digunakan adalah dengan menggunakan konsep segitiga terbalik. Konsep ini dimulai dari *Grand Theory* yaitu Keuangan Daerah, *Middle Theory* yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan *Operasional Theory* yaitu Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD. Skema konsep teori tersebut dapat digambarkan oleh peneliti sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018.

Keuangan Daerah

Menurut Suwanda (2013: 45) keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

Untuk mengelola suatu keuangan daerah diperlukannya tahapan kebijakan salah satunya dengan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang baik, memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Suwanda (2015: 66) Laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggaran.”

Untuk melihat bagaimana laporan keuangan disajikan dengan baik bisa dilakukan dengan cara menganalisis suatu laporan keuangan tersebut, dengan analisis bisa diketahui posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Melalui analisis tersebut juga dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan cara melakukan pengukuran analisis rasio keuangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Menurut Mahmudi (2016: 141) Rasio efektivitas dan efisiensi PAD adalah sebagai berikut:

“Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD.”

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti akan menganalisis Pendapatan Asli Daerah dengan cara:

1. Menghitung rasio efektivitas penerimaan PAD dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).
2. Menghitung rasio efisiensi PAD dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD.
3. Mencari tahu dan menganalisis sejauh mana strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam meningkatkan dan mengoptimalkan PAD.

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Penelitian dilakukan Tahun 2018.

1.7. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut: Keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat diketahui berdasarkan tingkat efektivitas dan efisiensi PAD. Kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai lebih dari 100% dan dalam melakukan pemungutan pendapatan dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%.